



MANIFESTO
WOMEN'S MARCH JAKARTA 2025
Jakarta, 28 September 2025

Membayangkan bulan September selalu memberikan impresi yang bergejolak di benak dan hati kami, perempuan, rakyat Indonesia. September tidak hanya membawa ingatan kami pada awal mula pembantaian 1965 terhadap ratusan ribu manusia, fitnah kejam terhadap ribuan perempuan yang melawan dan berpikir kritis. September di era reformasi juga akhir-akhir ini menggambarkan puncak kemarahan dan kegelisahan rakyat Indonesia yang meletup-letup, mendidih, tak tertahankan. Untuk kesekian kalinya, rezim maskulin yang rakus, patriarkis, otoriter, dan fasis secara telanjang membawa ibu pertiwi tersungkur dalam kegelapan.

Ekologi dan Masyarakat Adat

Alam diekstraksi. Mineral dan seisinya dikeruk habis-habisan. Ekosistem tidak seimbang, beberapa terancam mengalami kepunahan. Masyarakat adat penjaga alam dikriminalisasi di tanah Papua, di Sulawesi, di NTT, di berbagai wilayah Indonesia. Ironinya, mereka melakukan eksploitasi besar-besaran atas nama keberlanjutan. Keberlanjutan yang dimaksud ditandai dengan meningkatnya penjualan mobil-mobil listrik yang berseliweran di kota-kota. Dengan demikian, tambang batu bara yang telah menorehkan luka dalam di tanah Kalimantan, tambang nikel pembawa musibah alam di Halmahera dapat terus berlanjut: 24 jam tanpa henti. Subsidi bagi rakyat kecil? Bagi mereka, pemilik kapital dengan kekayaan yang tak masuk akal lah yang berhak mendapatkan subsidi, termasuk subsidi kendaraan listrik. Belum lagi menghitung bonus pajak amnesti yang dirilis berseri-seri. Nyatanya, keberlanjutan yang dinikmati kelas menengah atas bersumber dari darah-darah perempuan, masyarakat adat yang mereka usir dan tangkap, yang mereka siksa karena sumber kehidupannya diputus tak tersisa. Begini rasanya dijajah oleh negeri sendiri.

Ekonomi Feminis

Dengan sistem yang eksploitatif ini, mereka membiarkan para perempuan, rakyat kecil dan kelas menengah, 99% dari kami, mati-matian bekerja banting tulang, tidak kenal siang ataupun malam, di rumah, di jalan, di pabrik-pabrik, kantor, hingga menembus batas negara menjadi buruh migran. Kerja-kerja perawatan secara sistemik direndahkan, dibuat rentan, minim jaring pengaman dan perlindungan. Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), jangankan bermimpi dapat upah dan kerja layak, satu kata pengakuan pun tak keluar dari mulut busuk para penguasa. Apa jadi sistem kapitalis yang menggerogoti tulang ibu pertiwi tanpa campur tangan kerja-kerja perawatan para perempuan? COVID-19 memperlihatkan secara gamblang bagaimana kerja-kerja perawatan signifikan andilnya dan menopang kehidupan masyarakat. Tapi mau kulit ini mengering, keriput, terkikis, keringat kami tidak pernah cukup membiayai hari-hari. Harga pokok melambung tinggi, pendidikan kian sulit, dan akses layanan kesehatan selalu mencekik. Kami tidak habis pikir, bagaimana pajak rakyat yang terus meroket tidak berbanding lurus dengan jaminan kesejahteraan buat kami, perempuan dan rakyat kecil.

Kesehatan Publik

Lebih dari 4.000 ibu meninggal per 100 ribu kelahiran. Mayoritas dikarenakan infeksi, pendarahan hebat, dan eklampsia. Ketidakmerataan fasilitas kesehatan sebagai konsekuensi logis pembangunan ala kapitalisme menjadi sumber masalah utama. Bagaimana tidak? Infrastruktur layanan

kesehatan dibangun bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan seberapa besar daya beli pasar di wilayah tersebut. Sebuah logika tiarap yang memperlebar jurang kesenjangan. Akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi sangat terbatas, kualitasnya masih di bawah batas. Restriksi akses aborsi aman terjadi dengan berbagai upaya. Stigma dan diskriminasi terhadap perempuan dan ragam gender serta seksualitas mewabah. Tak jarang perempuan dengan HIV/AIDS digantung hidupnya karena masalah perang harga obat yang muncul secara reguler. Di tengah segudang pekerjaan rumah ini, BPJS sebagai satu-satunya perlindungan sosial yang universal dipaksa surplus. Apakah ini yang dinamakan negara berbisnis dengan rakyat? Yang rentan dibuat semakin termarjinalkan.

Pendidikan

Adapun upaya perbaikan gizi yang mereka lakukan hanyalah performatif. Kebijakan yang diawali oleh pencitraan guna mendulang voting justru menjadi lumbung korupsi. Terdapat setidaknya, 5.000 dapur fiktif program kebanggaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Di luar segala celotehan bahwa MBG sukses, faktanya, ratusan kasus keracunan masih terjadi di implementasinya yang sudah menginjak hampir satu tahun. Celakanya, anggaran sebesar Rp 236 triliun ini merupakan anggaran pendidikan. Triliunan rupiah pajak rakyat terbuang sia-sia membiayai dapur fiktif di tengah 3,7 juta guru honorer hidup dengan upah 1 - 3 juta per bulan, akses pendidikan yang mengeksklusi perempuan yang hidup dengan disabilitas serta individu dengan ragam gender dan seksualitas. Belum lagi kurikulum pendidikan yang tidak relevan dengan kehidupan masyarakat adat. Ini semua merupakan gambaran pendidikan yang didesain secara neoliberal. Alih-alih bermanfaat bagi masyarakat di tapak, ia tumbuh bagaikan menara gading yang berjarak dengan rakyat, di mana nilai-nilai anti HAM dan anti feminis juga tumbuh subur di dalamnya. Sekali lagi, kebijakan politik maskulin mengabaikan kaca mata feminisme. Upaya mendukung reproduksi sosial seharusnya menjadi prioritas pemerintah di atas ambisi profit. Sudah sepatutnya ia diejawantahkan dalam bentuk layanan dan fasilitas publik yang berkualitas, aksesibel, inklusif, serta adil bagi semua.

Gender, seksualitas, dan KBGS.

Di luar kepelikan di atas, perempuan dan kelompok yang termarjinalkan masih harus berjibaku dengan kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS). Catatan Tahunan Komnas Perempuan menemukan 330.097 kasus KBGS terhadap perempuan terjadi sepanjang 2024. Sementara itu, Arus Pelangi mencatat setidaknya lebih dari 373 individu dari kelompok ragam gender dan seksualitas mengalami kekerasan dan diskriminasi selama periode 2021 hingga 2023. Kekerasan fisik, seksual, ekonomi, psikis dan verbal, perundungan jadi ancaman sehari-hari. Secara spesifik, kepercayaan heteronormatif menciptakan kekerasan berupa perubahan orientasi seksual atau “terapi konversi” yang dialami khusus bagi kelompok ragam gender dan seksualitas. Normalisasi bias-bias gender dan minimnya edukasi seputar kesetaraan gender menjadi akar berkembangnya KBGS. Sialnya, kelambatan pemerintah menangani KBGS memakan ratusan korban setiap tahunnya, melahirkan femisida, pembunuhan terhadap perempuan dan transpuan. Setiap dua hari, ada satu perempuan yang merengas nyawa karena femisida. Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah patriarkis sehingga tidak dapat memberikan ruang aman bagi perempuan dan kelompok rentan.

Hukum dan Kebijakan Publik

Corak pemerintah yang patriarkis juga tercermin dari melimpahnya aturan hukum yang tidak berperspektif gender, mengancam otonomi tubuh, membatasi ruang ekspresi, dan tentu saja tidak berpihak pada rakyat. Setidaknya, 177 Perda diskriminatif berjamuran, merugikan perempuan dan

kelompok rentan, serta tidak adanya kebijakan anti-diskriminasi yang komprehensif. Di tingkat nasional, sederet kebijakan yang menguntungkan segelintir orang justru buru-buru disahkan. Kami masih mengingat bagaimana Omnibus Law dipaksa sah melalui rapat-rapat tertutup di hotel-hotel mewah. Saat ini, RUU POLRI dan RUU KUHAP dibahas dengan isi yang memperlebar kewenangan aparat. Kontras, berdekade-dekade RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tidak kunjung disahkan. Sudah cukup kami dibuat naik pitam oleh kelakuan para anggota rakyat yang secara gragas dan tanpa malu-malu hidup bermewahan di atas penderitaan umat.

Kebebasan Berekspresi, Militerianisme, dan Otoritarianisme

Dan, ketika kami memberontak, menolak diam, suara kami mereka bungkam. Saat kami pilih turun ke jalan, mereka hadang dengan tank-tank dan barracuda, lengkap dengan gas air mata hasil dari jerih keringat pajak kami. Kriminalisasi secara masif dilakukan kepada kami yang menagih hak-hak dasar, kepada kami yang menjaga rumah dan lingkungan dari proyek-proyek pemerintah yang memberangus masa depan kami. Ratusan ditangkap semena-mena tanpa prosedur yang jelas, buku dan ilmu pengetahuan dijadikan barang bukti perlawanan. Apa lagi kalau bukan cerminan pemerintah otoriter yang menggunakan politik maskulin nan fasis? Tak sudi komcad dihidupkan kembali. Berharap apa kami dipaksa berlatih seperti militer yang selama ini dibayar untuk menghajar saudaranya sendiri? Hingga manifesto ini kami kumandangkan, kami masih menanti pembebasan puluhan teman kami dari sandera Polri.

Tanpa basa-basi rezim kali ini memperlihatkan wajah terburuknya di hadapan negeri. Ia selalu punya cara untuk berkamuflase, membingkai narasi, membubarkan diskusi kritis, melakukan teror-teror, dan menuduh kami seorang anarkis. Jika anarkis berarti menolak ditindas, menolak represi dan eksploitasi, maka kami lah anarkis itu. Jika anarkis berarti menggugat upaya pengaburan sejarah, maka kami lah anarkis itu. Jika anarkis berarti menjunjung tinggi prinsip dan nilai keadilan sosial, maka kami lah anarkis itu. Tidakkah mereka merasa puas bukan hanya telah menghisap habis bumi ibu pertiwi, tetapi juga tubuh perempuan hingga ke tulang-tulang tanpa tersisa?

Lewat manifesto ini, di September 2025, kami bersolidaritas, menjaga semangat kesetaraan, dan keadilan sosial yang selama ini mereka gerus di berbagai lini. Kami Women's March Jakarta menyerukan penolakan kepemilikan alam dan seisinya, juga tubuh perempuan, dari tangan-tangan rakus yang penuh kekerasan. Kami menggugat agar kedaulatan dikembalikan ke rahim perempuan, dikembalikan ke tangan rakyat.

“Saya tidak akan bebas, jika ada perempuan lain yang belum bebas.”

Sebagai bentuk perlawanan yang terorganisir dan berakar pada pengalaman kolektif komunitas, kami, Women's March Jakarta menyuarakan **Sebelas Dalil Keadilan Feminis**. Tuntutan ini bukan hanya daftar aspirasi, tapi juga peta jalan menuju perubahan struktural. Inilah seruan kami:

1. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan seluruh kegiatan ekstraktif yang merampas ruang hidup, membahayakan ekologi, dan mengerahkan aparat keamanan untuk membungkam masyarakat adat maupun warga.

2. Turunkan harga bahan pokok dan pastikan jaminan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali, dengan mengalokasikan dana publik untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, serta pencegahan stunting dan kematian ibu.
3. Segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan revisi secara partisipatif UU Perkawinan, KUHP, KUHPA, serta cabut UU Omnibus Law dan regulasi diskriminatif lainnya yang melanggengkan kekerasan struktural.
4. Akui kerja-kerja perawatan dan kerja reproduktif sebagai kerja penting, serta hapus praktik magang eksploitatif, diskriminasi berbasis gender dan disabilitas di dunia kerja, dan lindungi pekerja migran dari kekerasan sistemik.
5. Hapus seluruh aturan diskriminatif dan kriminalisasi terhadap perempuan, queer, pegiat HAM, pekerja seks, ODHIV, masyarakat adat, penghayat, penyandang disabilitas, serta kelompok marjinal lainnya.
6. Negara wajib mengakui femisida sebagai krisis nasional, menyusun indikator bahaya untuk pencegahan KDRT dan femisida, serta menjamin perlindungan komprehensif bagi transpuan, queer disabilitas, pekerja seks, dan korban kekerasan seksual termasuk yang dimediasi teknologi.
7. Jamin akses layanan kesehatan yang aman, legal, bebas diskriminasi, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan aborsi aman, sebagai bagian dari hak atas kesehatan dan otonomi tubuh.
8. Hentikan pelecehan seksual yang difasilitasi AI, *deepfake*, serta teknologi manipulatif lainnya, dan regulasikan teknologi digital untuk melindungi anak, buruh migran, dan kelompok rentan dari kekerasan dan eksploitasi daring.
9. Reformasi kepolisian agar berperspektif gender dan humanis; hentikan kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, mahasiswa, seniman, dan warga yang bersuara, serta bebaskan tahanan politik.
10. Tarik pasukan dari wilayah konflik kemanusiaan, termasuk tanah Papua, dan hentikan pendekatan militeristik serta otoritarian dalam penanganan masyarakat sipil.
11. Wujudkan ruang politik dan publik yang aman, inklusif, representatif, dan bebas sensor, serta akui ingatan kolektif perjuangan rakyat dengan menjamin keamanan holistik, depatologisasi identitas, dan dukungan psikososial bagi komunitas rentan.